

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dalam menjalankan peran sebagai aktor hubungan internasional, Indonesia mengupayakan berbagai langkah yang mendorong akses perempuan di Afghanistan yang lebih besar sehingga dapat membuka peluang untuk terciptanya kesetaraan gender di Afghanistan. Sudut pandang dan komitmen Indonesia dalam memajukan kesejahteraan perempuan Afghanistan yang menitikberatkan pada nilai kesetaraan gender pada kebijakan luar negerinya merefleksikan gagasan konsep pengarusutamaan gender. Dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan di Afghanistan oleh Indonesia, isu mengenai ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dimainkan mengingat Indonesia sebagai Institusi yang aktif dalam ranah internasional. Dalam bidang ekonomi, Indonesia menjalankan program pelatihan kerja untuk perempuan di Afghanistan, serta berpartisipasi aktif dalam forum ekonomi perempuan internasional guna memperjuangkan hak-hak ekonomi perempuan di Afghanistan.

Untuk mengimplementasikan komitmen Konferensi Beijing yang menjadi momentum penting bagi komitmen global terhadap kesetaraan gender, Indonesia juga mengakomodasi komponen penting dalam kesetaraan gender, yaitu pendidikan. Beasiswa yang diberikan oleh Indonesia dapat menjadi langkah untuk mengarusutamakan gender di Afghanistan. Dalam masalah akses kesehatan perempuan Afghanistan, Indonesia pun ikut berupaya dengan mengadakan pelatihan sosialisasi edukasi kesehatan ibu dan anak untuk perempuan di Afghanistan dan mengirimkan bantuan berupa 10 juta dosis vaksin polio ke Afghanistan guna menciptakan keadilan gender di Afghanistan. Indonesia dengan membawa nilai-nilai keadilan gender telah memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan di Afghanistan melalui kebijakan dan bantuan luar negeri, menunjukkan konsistensi upayanya dalam periode 2019-2022 yang tersaji pada penelitian ini.

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi perumusan keputusan oleh pemangku kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat luas, maka terdapat beberapa usulan yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Fenomena konflik di Afghanistan memiliki dimensi gender, sehingga strategi dan perumusan kebijakan dalam upayanya harus berdasarkan pada pengarusutamaan gender untuk memastikan baik penduduk perempuan maupun laki-laki dapat berpartisipasi dan menerima manfaat secara adil dan setara.
2. Permasalahan ketidaksetaraan gender di Afghanistan bersifat multi dimensi. Maka dari itu, diperlukan kolaborasi dan koordinasi antar pihak termasuk pemerintah, LSM, dan swasta/bisnis secara komprehensif dan sistematis, serta tidak hanya melalui pendekatan *top-down* tetapi juga pendekatan *bottom-up/grassroots* untuk mencapai kesetaraan yang lebih merata dan inklusif. Setiap pihak yang menjadi aktor dalam konflik Afghanistan semakin meningkatkan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender terkhusus dalam pemantauan, pengawasan, serta evaluasi atas implementasi strategi guna optimalisasi di semua tingkatan.
3. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa sudut pandang gender dapat menjadi mekanisme penting dalam menekankan pengambilan kebijakan, komitmen, partisipasi dan pemberdayaan, serta akuntabilitas masyarakat terhadap pembangunan suatu negara.

### 6.2.2 Saran Teoritis

Meskipun penelitian ini dapat menganalisis upaya Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan di Afghanistan melalui sudut pandang yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, namun masih terdapat kelemahan dari penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi perhatian lebih lanjut oleh penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengingat penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif, diperlukan adanya kajian lebih lanjut yang mengukur efektivitas upaya

Indonesia dalam kesetaraan gender di Afghanistan secara kuantitatif. Pendekatan penelitian ini lebih berfokus pada interpretasi fenomena dan eksplorasi makna, sedangkan jika ingin diuji dengan teori tertentu dan meneliti hubungan antara variabel agar hasil penelitian dapat terukur, maka diperlukan metode kuantitatif untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antar variabel.

2. Terdapat keterbatasan data primer yaitu data primer masih belum digunakan untuk memverifikasi dan mengkaji Upaya Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan di Afghanistan.
3. Konsep pengarusutamaan gender dan feminisme institusional dalam penelitian ini hanya menganalisis sejauh mana asumsi konsep-konsep tersebut terefleksikan dan termanifestasikan dalam bentuk upaya Indonesia, belum sampai kepada tahap program tersebut dinilai efektivitasnya dalam data yang berangka (*numbered data*).